



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<p>1. Achmad Sanusi (1991) Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia" Bandung, Tarsito</p> <p>2. Achmad M Ramli, Dinamika Konvergensi Hukum Telematika, dalam Sistem Hukum Nasional</p> <p>3. Ali Achmad (2002) Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan solusinya), Jakarta Ghilia.</p> <p>4. Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ansar,1400 H).</p> <p>5. Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412). Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.).</p> <p>6. AS. Hikam (1996) Demokrasi dan Civilk Society, Jakarta, LP3ES</p> <p>7. Alfian (1986) Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta</p> <p>8. Bagir Manan dan Kuntana Magnar (1993) Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung,</p> <p>9. Bernard Arief Sidharta (1997) Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju.</p> <p>10. Arief Sidharta 2007,"Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum", Bandung : Refika</p> <p>11. Bagir Manan (1996), Kedaulatan Rakyat Hak Azasi Nanusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta</p> <p>12. Benny. K. Harman, (1997) Konfigurasi politik dan Kekuasaan Kehakiman did Indonesia, Elsam,</p> <p>13. Bahar, Saafroedin (1997), Hak Asasi Manusia: Analisis KOMNAS HAM dan Jajaran Hankam ABRI, Sinar Harapan.</p> <p>14. Friedrich, Carl Joachim. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan Nusamedia</p> <p>15. Davidson, Scott (1994), Hak-hak Asasi Manusia, Jakarta; Grafiti</p> <p>16. Didi Nazmi Yunan (1992), Konsepsi Negara Hukum, Bandung Angkasa Raya.</p> <p>17. Friedmann, W. (2002), Teori dan Filsafat hukumTelaah Kritis atas Teori teori hukum (susunan 1) PT Raja Grafindo Persada, Jakarta</p> <p>18. Friedmann, W. (1994), Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II) PT Raja Grafindo Persada Jakarta</p> <p>19. Fuadi Munir (2007) Perbandingan Ilmu Hukum . Refika Aditama , Bandung</p> <p>20. Gunawan Setiardja, (1990) Dialektika Hukum dan Moral, Kanasius, Yogyakarta</p> <p>21. Hans Kelsen (1973) Alih bahasa Somardi, Teori Hukum Murni, Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Dekritif, Bandung Rimdi Press</p> <p>22. Herman Bakir (2007) Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Jakarta , Refika</p> <p>23. JJH. Brugink, (1999) Refleksi tentang Hukum, Citra, Bandung</p> <p>24. Lev Daniel S (1990) Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta LP3S</p> <p>25. Tebbit Mark, (2005) Philoshophy of Law An Introduction , Routledge , London.</p> <p>26. John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (2006).Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</p>								
Dosen Pengampu		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
(1)	(2)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori hukum dalam analisis kasus nyata untuk mengidentifikasi solusi yang efektif.	1.Mahasiswa dapat mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, dan posisi mata kuliah. 2.Mahasiswa dapat meng analisis kaitan pengua-saan substansi mata kuli ah dan pe ngem bang an keilmuan Pendidikan hukum. 3.Mahasiswa mengemukakan gagasan dalam pengembangan teori pendidikan hukum 4.Mahasiswa menyepakati beban bel ajar mata ku-liah untuk satu semester 5.Mahasiswa dapat mengidentifikasi tujuan Pendidikan Hukum dan kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional 6.Mahasiswa menjelaskan Pendidikan Hukum dengan HAM, Konstitusi, dan Etika Politik dalam konteks PKn	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Pembelajaran Berbasis Masalah. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")] Diskusi Online [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]			Materi: Rencana Program Semester Teeori Pendidikan Hukum ajar.Landaan Filsafat Landasan yuridis Lansdaan Sosial budaya Pendidikan Hukum dan konsep Negara hukum, Pen didikan Hukum dan Sistem hukum Sistem Peradilan, Kesadaran Hukum Pendidikan Hukum dan Keadilan dan Sistem Hukum, Pendidikan Hukum dan Tujuan Pendidikan Nasional. Konsep Negara Hukum Hak Azasi Manusia, Konstitusi, Pendidikan Hukum dan Pendidikan Etika Politik, Pendidikan Hukum dan Pendidikan Kewarga Negaraan Pustaka:	5%

2	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu hukum kontemporer secara kritis dan kreatif berdasarkan pemahaman dari pendidikan hukum yang diterima.	1.Kemampuan menganalisis isu hukum kontemporer 2.Kemampuan mengidentifikasi peran pendidikan hukum dalam pemikiran kritis dan kreatif	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Diskusi kelompok dan studi kasus. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang isu hukum kontemporer dengan pendekatan kritis dan kreatif [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Konsep pemikiran kritis dan kreatif, Pendidikan hukum dan relevansinya dengan isu-isu hukum kontemporer Pustaka: Handbook Perkuliahann	0%
3	Mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dampak kebijakan hukum terhadap pembangunan karakter dan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan Pancasila.	1.Analisis dampak kebijakan hukum 2.Kemampuan evaluasi terhadap pembangunan karakter dan kewarganegaraan 3.Penerapan konsep Pancasila dalam evaluasi	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi, studi kasus, dan presentasi. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Penugasan Esai tentang Analisis Dampak Kebijakan Hukum terhadap Pembangunan Karakter dan Kewarganegaraan [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Teori kebijakan hukum, Pembangunan karakter dan kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila Pustaka: Handbook Perkuliahann	5%
4	Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan metodologi penelitian interdisipliner yang dapat mengintegrasikan teori hukum dan pendidikan secara efektif untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang kompleks.	1.Kemampuan mengidentifikasi isu-isu sosial yang relevan 2.Kemampuan mengintegrasikan teori hukum dan pendidikan dalam metodologi penelitian 3.Kemampuan menyusun rencana penelitian interdisipliner	Kriteria: 1. 2.Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Pembelajaran Berbasis Masalah. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang penerapan metodologi penelitian interdisipliner dalam menyelesaikan isu-isu sosial terkini. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Pengenalan Metodologi Penelitian Interdisipliner, Teori Hukum dan Pendidikan dalam Konteks Penelitian, Langkah-langkah Menciptakan Metodologi Penelitian Interdisipliner Pustaka: Handbook Perkuliahann	5%
5	Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam desain kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.	1.Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam desain kurikulum 2.Analisis kritis terhadap relevansi prinsip hukum dengan konteks Pancasila dan Kewarganegaraan	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran berbasis masalah. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang penerapan prinsip hukum dalam desain kurikulum [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Konsep dasar hukum dalam pendidikan, Prinsip-prinsip hukum yang relevan, Desain kurikulum dalam konteks Pancasila dan Kewarganegaraan Pustaka: Handbook Perkuliahann	10%
6	Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam desain kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.	1.Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam desain kurikulum 2.Analisis hubungan hukum dengan pendidikan kewarganegaraan	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Diskusi kelompok dan studi kasus. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang penerapan prinsip-prinsip hukum dalam desain kurikulum, Penyusunan portofolio analisis hubungan hukum dengan pendidikan [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Prinsip-prinsip hukum dalam desain kurikulum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Hubungan hukum dengan pendidikan Pustaka: Handbook Perkuliahann	5%
7	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus hukum dengan pendekatan multidisipliner untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang PPKn.	1.Analisis kasus hukum dengan pendekatan multidisipliner 2.Kemampuan mengaitkan hukum dengan disiplin ilmu lain 3.Kemampuan menjelaskan dampak kasus hukum terhadap masyarakat	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Pembelajaran Berbasis Masalah. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang analisis kasus hukum dengan pendekatan multidisipliner, Penyusunan portofolio kasus hukum dengan pendekatan multidisipliner [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Konsep Analisis Kasus Hukum, Pendekatan Multidisipliner dalam Pemahaman Hukum, Dampak Kasus Hukum terhadap Masyarakat Pustaka: Handbook Perkuliahann	0%

8	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis secara kritis landasan filsafat epistemologi Pendidikan Hukum sebagai bagian dari kajian filsafat pendidikan hukum	1.Analisis kritis landasan filsafat epistemologi Pendidikan Hukum 2.Pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep epistemologi dalam konteks Pendidikan Hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Ujian Tengah Semester [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Ujian Tengah Semester [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Pengantar Filsafat Epistemologi, Konsep Dasar Epistemologi dalam Pendidikan Hukum, Analisis Kritis terhadap Landasan Filsafat Epistemologi Pendidikan Hukum Pustaka: Handbook Perkuliahan	5%
9	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan menganalisis efektivitas pendekatan pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.	1.Analisis efektivitas pendekatan pendidikan hukum 2.Evaluasi dampak kesadaran hukum di kalangan pelajar	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi kelompok dan presentasi. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang analisis efektivitas pendekatan pendidikan hukum [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Pendekatan pendidikan hukum, Kesadaran hukum, Evaluasi efektivitas Pustaka: Handbook Perkuliahan	5%
10	Mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas pendekatan pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar.	1.Kemampuan menganalisis efektivitas pendekatan pendidikan hukum 2.Kemampuan menyusun rekomendasi perbaikan pendekatan pendidikan hukum	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi kelompok, studi kasus, presentasi. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang studi kasus efektivitas pendekatan pendidikan hukum [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Pendekatan pendidikan hukum, Kesadaran hukum, Evaluasi efektivitas pendidikan hukum Pustaka: Handbook Perkuliahan	5%
11	Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan strategi pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teori hukum ke dalam praktik pendidikan kewarganegaraan.	1.Kreativitas dalam mengintegrasikan teori hukum ke dalam pembelajaran kewarganegaraan 2.Kemampuan menerapkan teori hukum dalam konteks pendidikan kewarganegaraan	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran Berbasis Proyek. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang penerapan teori hukum dalam pendidikan kewarganegaraan [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Teori Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, Strategi Pembelajaran Inovatif Pustaka: Handbook Perkuliahan	5%
12	Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan strategi pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teori hukum ke dalam praktik pendidikan kewarganegaraan.	1.Penerapan konsep hukum dalam pembelajaran kewarganegaraan 2.Kreativitas dalam mengembangkan strategi pembelajaran 3.Kemampuan mengintegrasikan teori hukum ke dalam praktik pendidikan	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran Berbasis Masalah. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang penerapan konsep hukum dalam pendidikan kewarganegaraan [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Konsep Hukum, Pendidikan Kewarganegaraan, Strategi Pembelajaran Inovatif Pustaka: Handbook Perkuliahan	5%
13	Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep hukum dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung pendidikan kewarganegaraan.	1.Analisis konsep hukum dalam kebijakan publik 2.Kemampuan merumuskan kebijakan publik yang mendukung pendidikan kewarganegaraan	Kriteria: Pedoman Penskoran Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Praktik / Unjuk Kerja	Diskusi kelompok dan studi kasus. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang penerapan konsep hukum dalam kebijakan publik [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Konsep hukum dalam kebijakan publik, Pendidikan kewarganegaraan, Proses pengembangan kebijakan publik Pustaka: Handbook Perkuliahan	10%
14	Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep hukum secara kritis dan analitis dalam konteks pengembangan kebijakan publik untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan.	1.Analisis konsep hukum dalam kebijakan publik 2.Kemampuan mengidentifikasi implikasi kebijakan terhadap pendidikan kewarganegaraan 3.Kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis hukum	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Portofolio	Pembelajaran berbasis masalah. [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Diskusi daring tentang studi kasus pengembangan kebijakan publik untuk pendidikan kewarganegaraan [TM:1x(2x50")] [PT BM:(1 1)x(2x60")]	Materi: Konsep hukum dalam kebijakan publik, Pendidikan kewarganegaraan, Analisis kebijakan publik Pustaka: Handbook Perkuliahan	10%

15	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan antara hukum dan kebijakan dengan praktik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.	1.pengaruh hukum terhadap praktik pendidikan kewarganegaraan 2.analisis kebijakan pendidikan kewarganegaraan	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Diskusi kelompok dan studi kasus. [TM:1x(2x50'')] [PT BM:(1 1)x(2x60'')]	Diskusi daring tentang studi kasus pengaruh hukum dalam pendidikan [TM:1x(2x50'')] [PT BM:(1 1)x(2x60'')]	Materi: Sistem Hukum Pendidikan di Indonesia, Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan, Analisis Pengaruh Hukum dalam Pendidikan Pustaka: Handbook Perkuliahann	10%
16	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah pengembangan teori pendidikan hukum dalam sistem hukum dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.	1.pengidentifikasi masalah 2.analisis dampak 3.solusi yang ditawarkan	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Diskusi, studi kasus, presentasi. [TM:1x(2x50'')] [PT BM:(1 1)x(2x60'')]	Diskusi daring tentang masalah-masalah pengembangan teori pendidikan hukum dalam sistem hukum dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia [TM:1x(2x50'')] [PT BM:(1 1)x(2x60'')]	Materi: Pengembangan teori pendidikan hukum, Sistem hukum di Indonesia, Pendidikan kewarganegaraan, Masalah-masalah dalam pengembangan teori pendidikan hukum Pustaka: Handbook Perkuliahann	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	57.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	12.5%
3.	Penilaian Portofolio	7.5%
4.	Praktik / Unjuk Kerja	7.5%
5.	Tes	15%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM= Tatap Muka, PT= Penugasan terstruktur, BM= Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 24 April 2025

Koordinator Program Studi S2
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

UPM Program Studi S2
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



RADEN RORO NANIK
SETYOWATI
NIDN 0025086704



NIDN 0015098006

File PDF ini digenerate pada tanggal 7 Januari 2026 Jam 10:19 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

